

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Asia Tenggara yang terdiri dari kawasan yang luas, dari zaman dahulu sudah didatangi oleh pengaruh India dan China yang beragama Hindu dan Budha. Kedua-duanya adalah kuasa-kuasa besar dengan peradaban yang tinggi. Pengaruhnya telah menyebar luas sampai ke pulau Melayu. Kedatangan orang Cina dan India membawa kebudayaan yang subur di pulau Melayu, membuat kawasan kepulauan Melayu mulai berkembang dan pengaruhnya masih terlihat sampai kini. Kedatangan orang Cina dan India menyebabkan terjadilah akulturasi dengan budaya setempat dan akhirnya lahirlah beberapa kerajaan-kerajaan kecil yang salah satunya adalah kerajaan Langkasuka (Mohd, 1994 : 34).

Kerajaan Langkasuka awal berdirinya pada tahun 80 – 100 M, yang letaknya berada di pantai Timur Semenanjung tanah Melayu diantara senggora dengan Kelantan. Ibu kotanya terletak di suatu daerah di dalam wilayah Patani. Pada zaman kerajaan Langkasuka orang Patani masih percaya pada hal – hal yang bersifat gaib dan masih memuja benda yang dipercayai mempunyai ruh.

Kerajaan Langkasuka mulai mencapai kemajuan ketika pertama kalinya menciptakan kapal-kapal sebagai alat transportasi menuju ke negeri China. Kemajuan yang dicapai oleh kerajaan Langkasuka menunjukkan ekonomian kuat, Raja Langkasuka mempunyai bala tentera yang berani dan rakyat hidup dengan aman dan damai membuat kerajaan ini terkenal di mata luar terutama China.

Semasa Sriwijaya memerintah kerajaan Langkasuka, kawasan ini dijadikan penyebaran agama Budha-Singhaless. Kerajaan Langkasuka dijadikan tempat penyebaran kebudayaan meneruskan bahasa Melayu Sankrit, agama, filsafat, ilmu pelayaran, seni musik, seni bina dan peralatan diraja. Pada tahun 1906 seorang sejarawan Barat yang bernama Charles Otto Blagden menemukan unsur sastra Melayu Klasik yaitu tentang kisah misteri Kerajaan Langkasuka di Patani.

Negara Patani mempunyai sejarah yang lama, yang tidak kalah dari Negara-negara yang ada di tanah Semenanjung Melayu lainnya seperti Malaka, Johor, Selangor dan Lain-lain. Sejarah lama Patani merujuk kepada kerajaan Melayu tua pengaruh India-Langkasuka. Seorang ilmuwan kajian Manusia dan Sosial di *Prince of Songkhla University* di Patani seni madakakul berpendapat bahwa Langkasuka adalah letaknya di Patani.

Kerajaan Langkasuka mengganti Nama menjadi Patani Darussalam yang dipimpin dan dikenal dengan kerajaan Kesultanan Patani sangat terkenal dengan pusat Pelabuhan besar di Nusantara. Raja-raja yang memegang tahta kerajaan Patani. Kerajaan Patani terbagi menjadi dua keturunan. Pertama dari keturunan kerajaan Sriwangsa di Kota Mahligai.

Patani mencapai puncak kemakmurannya pada masa pemerintahan Ratu-ratu yang terdiri dari Ratu Hijau (1584-1616 M.), Ratu Biru (1616-1624 M.), Ratu Ungu (1624-1635 M.), Ratu Kuning (1635-1688 M.). Pada masa ini jumlah penduduk bertambah dan padat kalau dibandingkan dengan Negara-negara Melayu yang lain di semenanjung Tanah Melayu. Ia di sifatkan sebagai sebuah pusat perdagangan yang penting bagi pedagang-pedagang Eropa dan Asia. Maka dapat

dikatakan bahwa, pada abad-abad yang lalu Patani merupakan zaman keemasan dan zaman kegemilangan yang disinari dengan nilai-nilai keislaman. Agama Islam dapat merubah masyarakat melayu Patani kepada pemikiran yang lebih maju dan mantap. Kemajuan dalam bidang Agama, Pendidikan, Perdagangan dan Kebudayaan ini membuat Patani menjadi sebuah Negeri yang makmur (Tunas,1989).

Hubungan Patani dengan Thailand setelah Ayudthaya jatuh ke tangan Burma pada tahun 1767 M. Disebabkan karena pihak Thailand meminta bantuan uang dari Sultan Patani, tapi permintaan itu tidak dihiraukan oleh Sultan, hal ini menyebabkan pihak Siam atau Negara Thailand merasa dihina dan sangat marah pada kerajaan Patani. Pada masa ini Patani sedang mengalami kemajuan yang begitu cepat dicapai oleh bangsa Melayu Patani, maka mengundang keirihan bagi pemerintah Siam-Thai terhadap Patani dan tekadnya untuk menguasai Negara Patani semakin nampak.

Akhirnya pemerintahan Thai mulai melakukan penyerangan terhadap negeri Patani, namun serangan tersebut mengalami kegagalan. Dengan tekad yang dirancang oleh Siam-Thai, pada akhirnya mereka berhasil menguasai Patani pada tahun 1785 M., di Rasmikan Negara Patani menjadi sebahagian wilayah Siam-Thai pada tahun 1902, dan dihapuskan dari peta dunia.

Kalau kembali kepada sejarah dahulu mengenai pergerakan yang berlaku di Patani untuk membebaskan orang-orang Minoritas Muslim dari pemerintahan Thailand sampai saat ini kondisi masyarakat mayoritas Muslim di Patani semenjak tahun 2004 mulai beberapa peristiwa, kedukaan terhadap Masyarakat Patani di

Thailand Selatan, pada tanggal 25 Oktober, enam anggota unit pertahanan sipil yang diangkat oleh pemerintah untuk menjaga desa ditangkap berdasarkan ketentuan darurat militer, dituduh memberikan senjata mereka kepada militan. Beberapa ribu orang kemudian datang ke kantor polisi di Takbai, Narathiwat. Mereka datang untuk memprotes, dan menuntut ke tidakadilan pemerintahan militer.

Akhirnya pasukan keamanan menembak kerumunan, menewaskan tujuh orang. Tidak dapat menemukan pemimpin kelompok, polisi dan pasukan militer menangkap lebih dari 1,300 orang memaksa mereka untuk merangkak dengan tangan terikat di belakang punggung mereka, memukul mereka dengan senapan, dan kemudian mereka disusun dalam beberapa lapisan dalam truk untuk dibawa ke kamp militer sejauh 90-mil di Patani Inkayut.

Ketika truk pertama tiba itu menemukan bahwa satu orang telah meninggal dalam perjalanan. Tidak ada tindakan yang diambil untuk segera membongkar atau bahkan menginformasikan orang-orang yang bertanggung jawab atas kendaraan lain, beberapa di antaranya tidak datang sampai berjam-jam kemudian. Pada saat semua truk diturunkan, 78 orang tewas karena sesak napas atau patah tulang sampai mati. Pada akhirnya, sebagian besar korban dibebaskan, 58 didakwa dengan perusakan harta milik Negara dan kepemilikan senjata.

Sampai saat ini di Patani keadaan yang susah semakin parah oleh karena sistem militerisme yang masih berlaku di Patani. Masyarakat tidak bisa berkumpul dan memperjuangkan haknya. Karena rasa takut yang menghantui warga Melayu di provinsi Patani, Yala, dan Narathiwat sekarang ini. Fenomena ini muncul

khususnya setelah merebaknya sejak kekerasan awal 2004. Rasa saling curiga berkembang di antara kedua golongan. Apalagi jika mereka tidak saling kenal. Orang-orang melayu Muslim selatan dianggap sebagai pengkhianat di atas tanah miliknya sendiri. Dengan berlaku harian, kasus atau kejadian yang menghilangkan nyawa korban warga Melayu Muslim di Selatan Thailand tidak bisa dihitung, istri tanpa suami, anak tanpa ayah, murid tanpa guru, masjid tanpa imam, warga tanpa pemimpin, masyarakat tanpa pemuda untuk membangun.

100 Tahun UU Darurat Militer – 10 Tahun Konflik, Dunia Internasional Masih Bungkam Peraturan Darurat (Emergency Decree) yang diberlakukan bagi tiga Provinsi dan sebagian daerah provinsi Songkla di provinsi selatan sejak pada tahun Juli 2005. Peraturan Darurat itu menggantikan UU Darurat Militer (Martial Law) dan harus diperbahurui setiap 90 hari dengan persetujuan siding Kabinet. Jadi, bukan produk hukum yang dikeluarkan atau disetujui Parlemen, apalagi berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Substansi Peraturan Darurat sepenuhnya melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dan Kovenan PBB tentang Hak Sipil dan Politik, serta Kovenan Anti Penyiksaan dan Perlakuan yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.

Sejak lama pemerintah Thailand yang mengaku berideologi Buddhisme itu melakukan diskriminasi rasial terhadap warga Melayu Patani yang menghuni wilayah-wilayah. Patani ratusan tahun lampau. Dengan Peraturan Darurat itu, maka pemerintah Thailand dapat melakukan penahanan selama 30 hari tanpa dakwaan kepada siapapun yang dicurigai, memeriksa dan menangkap warga tanpa jaminan

keselamatan dan pembelaan, serta melakukan penyadapan telepon kepada sembarang rumah penduduk warga Melayu di wilayah Selatan. Peraturan itu juga memberi kekebalan kepada pihak keamanan (tentara dan polis) dari segala gugatan, sehingga dikritik oleh pemerhati hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) akan menimbulkan suasana impuniti (tidak ada pertanggungjawaban hukum).

Ironis, tidak ada respon yang menandai dari masyarakat internasional. Seakan-akan dunia menutup mata dan bungkam terhadap pelanggaran berat HAM (hak asasi manusia) yang dilakukan pemerintah Thailand sejak konflik dilanda 10 tahun ini. Sampai saat ini sudah ramai warga Melayu yang ditahan secara paksa, tanpa bukti kesalahan yang nyata. Ada juga warga yang diincar pihak keamanan dengan alasan terlibat gerakan kemerdekaan yang bersenjata. Setiap hari adalah ketegangan dan kedekatan pada kematian bagi warga di Patani. Itu belum termasuk kasus pembunuhan dan penghilangan orang yang terdata.

Satu masalah terbesar yang tidak dapat diatasi (atau sengaja tidak mau diatasi) oleh kerajaan Thai ialah masalah keadilan. Tiga undang-undang (Undang-undang Darurat, Dekri Darurat serta Akta Keselamatan Dalam) yang menghapus Hak Asasi Manusia dan membataskan kebebasan rakyat, pihak berkuasa Thai telah membuat banyak tangkap atas orang Melayu Patani hanya berdasarkan aduan, syak atau tangkap muat secara sembrono, dengan alasan mereka itu terlibat keganasan, atau perjuangan atau sebarang serangan tanpa bukti kukuh. Siapa yang bersuara lantang atau mengkritik kerajaan akan dicap sebagai “penentang” atau pemberontak.

Sampai sekarang masyarakat Islam di bagian Selatan Thailand masih dihantui berbagai macam teror dari konflik-konflik yang masih saja terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Dari hati terdalam para masyarakat Patani tetap fokus pada cita-cita luhur mereka, yaitu mereka ingin Patani merdeka.

Berangkat dari realitas kondisi di atas, maka penulis ingin meneliti lebih jauh tentang konflik bagi masyarakat Patani, dan penelitian ini penulis angkat dengan judul **“Konflik Masyarakat Patani di Thailand Selatan (Penelitian Tentang Konflik antara Masyarakat Patani dan Pemerintah di Thailand Selatan)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Wilayah Patani dari zaman dahulu sampai sekarang rawan dengan yang namanya konflik, penyebab dari konflik ini terjadi karena permasalahan dari masyarakat Patani yang ingin memisahkan diri dari Thailand dan ingin merdeka. Karena menurut masyarakatnya wilayah Patani dulunya merupakan sebuah Negara yang aman.

Patani sekarang terkenal sebagai bumi jajahan Siam (Thailand) setelah Patani jatuh pada tangan Siam pada tahun 1785 M. Patani diresmikan menjadi sebuah wilayah bagian dari Siam pada tahun 1902. Sejak Siam merampas Negara Patani sampai sekarang Patani tidak pernah aman sentosa lagi. Dapat dikatakan seperti ini karena hal ini terbukti dengan adanya pemberontakan senjata yang terjadi antara Patani dengan Siam. Karena seringnya terjadi konflik di Patani, dalam penelitian ini saya ingin meneliti tentang konflik masyarakat patani di Thailand selatan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penelitian merumuskan permasalahan yang akan diteliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi Sosial Masyarakat Patani?
2. Bentuk-bentuk konflik apa saja yang terjadi di Thailand Selatan?
3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan konflik antara Masyarakat Patani dan Pemerintah Thailand?
4. Bagaimana menyelesaikan konflik tersebut?

1.4 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi Sosial Masyarakat Patani.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk konflik apa saja yang terjadi di Thailand Selatan.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan konflik di Thailand Selatan.
4. Untuk mengetahui penyelesaian konflik di Thailand Selatan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini, maka penelitian berharap untuk memberikan manfaat tersendiri diantaranya:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan ilmiah yang berkaitan dengan sosiologi khususnya sosiologi konflik.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberi masukan kepada tokoh-tokoh yang berkonflik, baik pihak pemerintah atau pun dari pihak Muslim Patani.

1.6 Kerangka Pemikiran

Konflik yang merupakan pertentangan secara langsung dan sadar antara individu atau kelompok untuk mencapai cita-cita bersama. Untuk mencapai cita-cita bersama ini, pihak lawan yang terlibat dalam konflik itu perlu “dihabisi” terlebih dahulu. Dalam situasi konflik, karena adanya perasaan pemusuhan yang kuat, kerap kali peniadaan lawan dianggap lebih penting dari pencapaian cita-cita (Rahman, 2011 : 57).

Dinamika konflik perebutan dikuasaan oleh kelompok yang hidup, ditandai oleh kemunculan kelompok yang memperebutkan kekuasaan dalam Negara. Dinamika konflik dalam sejarah manusia sesungguhnya ditentukan oleh keberadaan kelompok sosial (*‘ashobiyah*) berbasis pada identitas, golongan, etnis, maupun tribal. Kelompok sosial dalam struktur sosial mana pun dalam masyarakat dunia memberi konstibusi terhadap berbagai konflik. Hal ini di pengaruhi oleh sifat asal manusia yang sama dengan hewan. Nafsu adalah kekuatan hewani yang mampu mendorong berbagai kelompok sosial menciptakan berbagai gerakan untuk memenangi (*to win*) dan (*to rule*) (Susan, 2009 : 20).

Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut *society*, asal katanya *socius* yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu *syirk*, artinya bergaul. Adanya saling bergaul ini tentu karena ada bentuk-bentuk aturan hidup, yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh

unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan (Suharto, 1991: 28).

Masyarakat dalam pengertian yang luas dimaksud keseluruhan hubungan-hubungan dalam hidup bersama tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa dan sebagainya. Atau dengan kata lain: kebulatan dari semua perhubungan dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan dalam arti yang sempit masyarakat dimaksud sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu. Upamanya: ada masyarakat jawa, ada masyarakat sunda, masyarakat minang, masyarakat mahasiswa, masyarakat petani dan sebagainya, dipakailah kata masyarakat itu dalam arti yang sempit.

Terkait penelitian ini peneliti menggunakan teori konflik dari Karl Max, dalam teori ini konflik ini Max membahas tentang kelas sosial yang ada di masyarakat. Yaitu kaum borjuis dan kaum ploreten. Begitu pula dengan penelitian ini, di wilayah Thailand Selatan terjadi konflik pemerintah dan rakyat, yang peneliti gambarkan dalam penelitiannya, pemerintah di gambarkan sebagai kaum borjuis dan masyarakat sebagai kaum ploreten yang sudah terbukti masyarakat wilayah Thailand Selatan sebagai bangsa jajahan dari bangsa siam yaitu Thailand.

Selain teori dari Karl Max, peneliti juga menggunakan teori konflik dari Ralf Dahrendorf, karena semua peristiwa konflik yang terjadi di Thailand Selatan dikategorikan sebagai konflik sosial, dimana kekuasaan dan wewenang pihak pemerintah melebihi apa yang yang sepakat dalam undang-undang dasar Negara. Sehingga muncul ketidakpuasan dalam mengambil kebijaksanaan dalam keputusan peristiwa tersebut. Dahrendorf mengatakan bahwa ada dasar baru bagi

pembentukan kelas, sebagai pengganti konsepsi pemikiran sarana produksi sebagai dasar perubahan kelas itu. Menurut Dahrendorf, mengakui terdapatnya perbedaan diantara masyarakat yang memiliki sedikit dan banyak kekuasaan. Perbedaan dominasi itu dapat terjadi secara drastik. “Tetapi pada dasarnya tetap terdapat dua kelas sosial yaitu, yang berkuasa dan dikuasa”, hubungan-hubungan kekuasaan yang mengnyangkut bawahan dan atasan menyediakan unsur bagi kelahiran kelas. Dan kepentingan kelompok penguasaan merupakan nilai yang berupa ideologi keabsahan kekuasaannya, sementara kepentingan-kepentingan kelompok bawah melahirkan ancaman bagi ideologi, serta hubungan-hubungan sosial yang terkandung di dalamnya (Roho, 2007: 113).





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG